

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah badan yang memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, salah satu fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah melaksanakan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi dalam hal pemantauan orang asing, organisasi masyarakat dan penelitian di Provinsi Lampung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung melayani masyarakat dalam pengurusan surat izin atau rekomendasi penelitian/riset, surat keterangan tanda lapor (sktl) orang asing dan surat keterangan keberadaan ormas. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam melayani pengurusan izin sudah menggunakan standar komputerisasi yaitu microsoft excel dan microsoft word sebagai penunjang kegiatan operasional sehari-hari.

Dalam perkembangan zaman saat ini, teknologi sangat berkembang cepat. Penggunaan alat bantu teknologi komputer merupakan salah satu pendukung dalam memberikan hasil yang lebih baik dan akurat dalam proses kegiatan perkantoran. Pendataan data yang terstruktur rapi pada suatu kegiatan aktivitas kerja merupakan salah satu proses yang paling penting berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah sebagai pelayan publik diuntut untuk berkinerja dengan baik sehingga mampu menghasilkan jasa yang benar-benar prima dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pengurusan izin yang belum tersistem mengakibatkan penumpukan berkas, tidak ada laporan yang jelas tentang jumlah pengajuan izin dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pembuatannya, sehingga dapat mengakibatkan pungutan liar (pungli) jika proses ingin dipercepat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Maka dari itu dibutuhkan perubahan dalam pengolahan sistem kerja pengurusan izin dan untuk mengantisipasi kendala yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, maka diperlukan pengembangan sistem informasi dalam pengurusan izin.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba merancang sistem informasi yang digunakan untuk pengurusan izin secara online, dengan harapan rancangan sistem informasi ini dapat mempermudah, mempercepat masyarakat dalam mengajukan permohonan pengurusan izin dan membantu meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengajukan judul **"SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS WEB PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah yang diambil yaitu “Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pelayanan publik berbasis web pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung ?”

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan masalah yang ditemukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, maka penulis dalam pembuatan sistem ini membatasi ruang lingkup sistem yang akan dibuat dengan batasan sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung.
- b. Sistem informasi pelayanan publik ini dibuat hanya untuk pengurusan surat izin atau rekomendasi penelitian/riset, surat keterangan tanda lapor (sktl) orang asing dan surat keterangan keberadaan ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi yang memudahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung melayani masyarakat dalam pengurusan izin terkait surat izin atau rekomendasi penelitian/riset, surat keterangan tanda lapor (sktl) orang asing dan surat keterangan keberadaan ormas.

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan adalah :

1. Sistem informasi yang dibangun diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin dan membantu meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung .
2. Memberikan informasi dan mempercepat proses pengurusan izin di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa pokok bahasan, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum tentang tugas akhir yang meliputi latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang definisi-definisi dan teori-teori yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi obyek penelitian, metode pengumpulan data, prosedur penelitian, pengukuran variabel dan metode analisis

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil, implementasi, analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan penulis

perangkat Lunak, Spesifikasi Perangkat Lunak, Spesifikasi Perangkat Keras, Implementasi Program, Kelayakan Sistem

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran penulis yang diharapkan dapat membantu proses pengembangan sistem yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**